

Strategi Milobs TNI Menangani Konflik Komunal dan Interkomunal dalam Misi UNISFA Abyei

Barlian Prabowo¹ Ahmad G Dohamid² Gentio Harsono³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia^{1,2,3}

Email: barlianprabowo2008@gmail.com¹ ahmad.dohamid@idu.ac.id²
hgentio1969@gmail.com³

Abstrak

Konflik komunal dan interkomunal di Abyei, wilayah yang disengketakan antara Sudan dan Sudan Selatan, bersumber dari sengketa batas wilayah, identitas etnis, dan perebutan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi Military Observers (Milobs) TNI dalam misi United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA), strategi dialog kepada masyarakat setempat, serta faktor penghambatnya selama 2023–2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan Milobs TNI telah menjalankan fungsi observasi, patroli, monitoring, verifikasi, dan pelaporan sesuai mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta membangun dialog melalui pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat guna mencegah eskalasi konflik, meskipun masih menghadapi kendala bahasa, kepercayaan, keamanan, budaya, dan keterbatasan waktu. Efektivitas strategi ditentukan oleh integrasi fungsi observasi, diplomasi militer, komunikasi lintas budaya, dan pelibatan tokoh lokal.

Kata Kunci: Milobs TNI, UNISFA, Abyei, Konflik Komunal, Diplomasi Militer

Abstract

Communal and intercommunal conflict in Abyei, a territory disputed between Sudan and South Sudan, stems from border disputes, ethnic identity, and competition over natural resources. This study aims to analyze the implementation of Indonesian Military Observers (Milobs TNI) functions within the United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) mission, the dialogue strategies applied to local communities, and the obstacles encountered during the 2023–2024 period. This research adopts a qualitative method with a descriptive-analytical approach through in-depth interviews, documentation studies, and literature review, analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings show that Milobs TNI performed observation, patrol, monitoring, verification, and reporting functions in accordance with the United Nations mandate, and built dialogue by engaging tribal leaders, religious leaders, and community leaders to prevent conflict escalation, although language, trust, security, cultural, and time constraints remained significant challenges. The effectiveness of the conflict-management strategy is determined by the integration of observation functions, military diplomacy, cross-cultural communication, and the involvement of local leaders.

Keywords: TNI Military Observers (Milobs), UNISFA, Abyei, Communal Conflict, Military Diplomacy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan dan korban jiwa di Abyei, wilayah yang disengketakan antara Sudan dan Sudan Selatan, kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pertempuran antara kelompok Twic Dinka dan Ngok Dinka, yang sebelumnya pecah pada 2022 dan 2023, berpusat pada sengketa batas administratif, penguasaan wilayah selatan Abyei dan utara Kabupaten Twic, serta perebutan sumber daya alam (Achol, 2024). Situasi ini diperparah oleh kondisi kemanusiaan yang terus memburuk, kelangkaan layanan dasar, dan gelombang pengungsian akibat konflik yang meluas di Sudan sejak 2023 (UN News, 2024). Kompleksitas ini menuntut

pendekatan penanganan yang tidak semata berorientasi keamanan, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan dan dialog antarkomunitas. Dalam konteks tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengerahkan United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) sebagai kelanjutan dari misi UNAMID yang dibubarkan pada 2011 setelah Sudan Selatan memisahkan diri melalui referendum (United Nations Security Council, 2011). UNISFA bertugas memulihkan ketenangan, melindungi warga sipil, serta bekerja sama dengan otoritas lokal dan tokoh masyarakat guna mencegah serangan balasan antarkelompok. Dewan Keamanan PBB bahkan memperpanjang mandat UNISFA hingga November 2025 melalui Resolusi 2760 (2024) sebagai respons atas eskalasi kekerasan yang berulang di wilayah tersebut.

Urgensi penanganan konflik di Abyei semakin nyata mengingat pasukan penjaga perdamaian PBB sendiri kerap menjadi sasaran kekerasan; sebuah kendaraan lapis baja diserang dalam penyergapan dan pos pasukan “helm biru” di Marial Achak ditembaki sebelum penyerang berhasil dipukul mundur (UN News, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan pengamat militer bukan sekadar simbol kehadiran internasional, melainkan garda terdepan yang menghadapi risiko nyata dalam upaya menahan laju eskalasi kekerasan komunal sekaligus menjaga keberlangsungan proses dialog perdamaian antara Sudan dan Sudan Selatan. Indonesia turut berkontribusi dalam misi ini melalui pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Military Observer (Milobs). Milobs TNI bertugas melakukan pengamatan dan pengawasan situasi keamanan, memfasilitasi dialog antarkomunitas yang bertikai, melindungi warga sipil dari kekerasan, mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan, serta melaporkan perkembangan situasi keamanan kepada Force Commander UNISFA dan pimpinan TNI. Sebagai pengamat militer, Milobs memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, mencegah eskalasi konflik, dan melaporkan perkembangan situasi kepada PBB (Soegeng et al., 2021). Namun demikian, keberhasilan peran ini tidak lepas dari sejumlah tantangan, mulai dari ancaman kelompok bersenjata, keterbatasan fasilitas komunikasi, hingga kompleksitas budaya lokal yang memengaruhi dinamika komunikasi di lapangan. Sebelum diberangkatkan, personel Milobs dan Military Staff (Milstaff) TNI dibekali materi Core Pre-Deployment Training Material, Specialized Training Material, serta latihan aplikasi lapangan yang mencakup latar belakang konflik di berbagai wilayah misi PBB, termasuk Abyei, dengan tujuan menjaga profesionalisme sekaligus nama baik Indonesia sebagai duta bangsa di kancah internasional (Puspen TNI, 2019). Kesiapan ini menjadi penting sebab keberhasilan Milobs dalam menjalankan mandat sangat bergantung pada kemampuan mereka membangun kepercayaan dengan masyarakat yang telah lama hidup dalam bayang-bayang konflik berkepanjangan.

Kajian tentang peran PBB dan pengamat militer dalam menangani konflik di Abyei telah banyak dilakukan. Averil (2024) mengkaji kontribusi UNISFA, UNMIS, dan UNMISS dalam memfasilitasi dialog dan mendukung perundingan damai antara Sudan dan Sudan Selatan, dan menyimpulkan bahwa kerja sama berkelanjutan dengan dukungan lembaga internasional sangat menentukan stabilitas kawasan. Taskiyah, Elvlyn, dan Meigen (2021) menyoroti tugas UNISFA dalam pemantauan pemindahan pasukan, demiliterisasi, dan penetapan zona perbatasan aman, serta menemukan bahwa koordinasi antaraktor dan keterbatasan peran observer menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas kawasan yang dinamis. Mkeremy (2022) mengungkapkan bahwa pengamat militer PBB di Afrika menghadapi risiko tinggi dari kelompok bersenjata dan tuntutan penguatan metode kerja serta perlindungan personel. Haripin (2020) mengulas keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang, termasuk peran sebagai Military Observer, sebagai bagian dari reformasi profesionalisme dan strategi politik luar negeri Indonesia. Sementara itu, Wol (2024) menemukan bahwa UNISFA masih

menghadapi kesulitan signifikan dalam menangani perselisihan batas wilayah dan perbedaan persepsi antarkomunitas mengenai pelaksanaan mandat misi.

Kajian-kajian terdahulu tersebut secara umum berfokus pada level kelembagaan PBB atau pada tantangan struktural misi penjaga perdamaian secara makro, namun belum banyak mengulas secara mendalam bagaimana personel Milobs TNI secara spesifik menjalankan fungsi observasi dan membangun strategi dialog mikro dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas di tingkat akar rumput selama periode penugasan 2023–2024. Studi terdahulu juga belum banyak mengaitkan pelaksanaan tugas Milobs dengan kerangka teori resolusi konflik komunal dan diplomasi militer secara simultan untuk menjelaskan bagaimana strategi lintas budaya diterjemahkan menjadi praktik lapangan. Kesenjangan (research gap) inilah yang mendasari kebaruan (novelty) penelitian ini, yaitu menghadirkan analisis berbasis pengalaman langsung personel Milobs TNI dalam menjalankan fungsi observasi sekaligus strategi dialog komunitas di Abyei, dengan mengintegrasikan International Peacekeeping Operation sebagai grand theory, Conflict Resolution Theory dan Military Diplomacy Theory sebagai middle theory, serta konsep Military Observer sebagai applied theory.

Konflik komunal di Abyei antara kelompok Dinka Ngok, yang mayoritas menetap di wilayah tersebut, dan kelompok Misseriya, yang bersifat nomaden, memiliki dimensi identitas dan trauma kolektif yang diwariskan lintas generasi, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan intervensi militer, tetapi memerlukan pendekatan sosial-budaya yang sensitif terhadap kearifan lokal (Jenkins, 2019). Dalam kerangka ini, Milobs berperan sebagai aktor netral yang memfasilitasi dialog antarkomunitas melalui community-based dialogue dan pelibatan struktur sosial lokal (Diamond & McDonald, 1996). Teori manajemen konflik turut menegaskan bahwa keberhasilan Milobs tidak diukur dari peniadaan konflik secara total, melainkan dari kemampuannya mengelola situasi agar tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka, melalui deteksi dini, fasilitasi dialog netral, dan pemantauan berkelanjutan (Johansson, 2004). Penelitian ini difokuskan pada strategi yang diterapkan Milobs TNI dalam menangani konflik komunal dan interkomunal selama penugasan dalam misi UNISFA di Abyei, Sudan, pada periode 2023–2024. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Milobs TNI menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengamati serta mengawasi situasi keamanan di Abyei; bagaimana Milobs TNI melakukan dialog dengan masyarakat di wilayah konflik; dan faktor-faktor apa saja yang menghambat proses dialog tersebut selama periode 2023–2024.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan fungsi Milobs TNI dalam mengamati dan mengawasi situasi keamanan di Abyei, Sudan; mengetahui strategi dialog yang diterapkan Milobs TNI kepada masyarakat di wilayah konflik; serta menganalisis faktor-faktor penghambat yang memengaruhi proses dialog tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian resolusi konflik dan diplomasi militer dalam operasi pemeliharaan perdamaian, sekaligus kontribusi praktis bagi TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan UNISFA dalam merumuskan kebijakan optimalisasi peran Military Observer pada penugasan misi perdamaian dunia di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan fungsi Milobs TNI dalam operasi penjagaan perdamaian di Abyei, Sudan, beserta berbagai hambatan yang dihadapi selama penugasan pada periode 2023–2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bermaksud memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan

dituangkan dalam bentuk deskripsi kata-kata pada konteks alamiah, sebagaimana dikemukakan Moleong (2007). Sifat deskriptif penelitian ini tercermin dari fokusnya pada penggambaran keadaan yang terjadi pada saat penugasan tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap objek yang diteliti. Penelitian dilaksanakan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Markas Besar TNI, serta melalui wawancara daring maupun luring dengan personel Milobs TNI yang pernah tergabung dalam misi UNISFA di Abyei, Sudan. Lokasi tersebut dipilih karena memberikan akses terhadap dokumentasi resmi, arsip laporan misi, serta informan utama yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian direncanakan berlangsung selama periode Juni hingga Desember 2025, mencakup tahap penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir.

Subjek penelitian atau informan dipilih secara purposive dengan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam operasi UNISFA di Abyei. Informan penelitian terdiri atas satu perwira dari unsur pembinaan operasi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI dan lima personel Military Observer yang bertugas di Sektor Utara maupun Sektor Tengah UNISFA selama periode 2023–2024. Objek penelitian adalah strategi penanganan konflik komunal dan interkomunal oleh Milobs TNI, dengan fokus pada strategi komunikasi, diplomasi militer, dan mekanisme intervensi damai yang diterapkan dalam menghadapi dinamika konflik horizontal antara kelompok Dinka Ngok dan Misseriya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap buku, artikel jurnal, laporan resmi, serta arsip misi yang relevan dengan fungsi dan tugas Milobs. Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018), didukung uji transferabilitas melalui penyajian hasil penelitian secara rinci dan sistematis, uji dependabilitas melalui konsultasi berkelanjutan dengan pembimbing, serta uji konfirmabilitas melalui peningkatan ketekunan dan diskusi teman sejawat (Prastowo, 2012).

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara simultan dan berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh. Kondensasi data dilakukan melalui pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan peringkasan informasi hasil wawancara serta dokumentasi agar dapat saling menguatkan satu sama lain. Data yang telah dikondensasi selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi terhadap fungsi observasi, strategi dialog, dan hambatan yang dihadapi Milobs TNI, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ringkasan informan penelitian ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan/Posisi	Instansi/Penempatan
INF-01	Direktur Pembinaan Operasi	PMPP TNI
INF-02	Military Observer	UNISFA – Sektor Utara
INF-03	Military Observer	UNISFA – Sektor Tengah
INF-04	Military Observer	UNISFA – Sektor Utara
INF-05	Military Observer	UNISFA – Sektor Tengah
INF-06	Military Observer	UNISFA – Sektor Utara

Sumber: Diolah peneliti (2026)

Fungsi Milobs dalam Mengamati dan Mengawasi Situasi Keamanan Hasil wawancara menunjukkan bahwa tugas utama Milobs TNI di Abyei adalah melakukan patroli dan

pengamatan rutin terhadap dinamika keamanan wilayah. Informan INF-01 menegaskan bahwa setiap kejadian di lapangan harus tercatat dan dilaporkan kepada markas besar UNISFA sebagai bahan pengambilan keputusan, dan tugas ini menuntut netralitas, ketelitian, serta keberanian karena kondisi lapangan yang senantiasa berubah. Informan INF-02 menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan terhadap pergerakan kelompok bersenjata maupun aktivitas masyarakat sipil, semata untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap kesepakatan damai, bukan untuk melakukan intervensi terhadap pihak yang berkonflik. Pola kerja Milobs juga bersifat terstruktur. Informan INF-03 menuturkan bahwa patroli harian dilakukan di sektor yang telah ditentukan, disertai dokumentasi aktivitas masyarakat dan potensi ancaman yang kemudian dilaporkan melalui sistem pelaporan harian UNISFA. Informan INF-04 menambahkan bahwa Milobs juga dituntut menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk memperoleh informasi yang tidak selalu terlihat dalam patroli fisik, sehingga fungsi observasi tidak semata bersifat teknis-militer tetapi juga sosial. Informan INF-05 dan INF-06 menekankan pentingnya sikap objektif dan prinsip netralitas yang mutlak dijaga, karena sekecil apa pun keberpihakan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan pihak yang berkonflik, sementara laporan yang mereka susun menjadi dasar langkah strategis UNISFA.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa Milobs TNI menjalankan fungsi observasi melalui kombinasi patroli rutin, dokumentasi sistematis, pos pengamatan tetap di titik rawan gesekan antarkomunitas, serta komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat, yang seluruhnya dilandasi prinsip netralitas dan ketelitian dalam pelaporan. Strategi Dialog Milobs dengan Masyarakat di Wilayah Konflik Dialog dengan masyarakat dilakukan Milobs TNI secara rutin, terutama saat patroli singgah di desa maupun pasar. Informan INF-01 menjelaskan bahwa dialog tidak dibatasi pada isu keamanan, tetapi turut mencakup keluhan warga terkait akses air, jalan, dan pasar, sehingga hubungan yang terbangun menjadi lebih akrab dan humanis. Informan INF-02 mengungkapkan bahwa dialog selalu dimulai dengan percakapan ringan agar warga tidak merasa diawasi, sebuah strategi komunikasi yang bertujuan membangun rasa percaya sebelum menggali informasi yang lebih substantif. Informan INF-03 menuturkan bahwa Milobs secara sengaja menemui tokoh masyarakat dari kelompok Ngok Dinka maupun Misseriya tanpa membedakan pihak, sebagai wujud menjaga netralitas sekaligus memastikan seluruh komunitas merasa diakui. Pendekatan ini memungkinkan Milobs memperoleh informasi tambahan yang tidak terdeteksi melalui observasi visual, misalnya pergerakan kelompok pemuda bersenjata. Informan INF-04 menambahkan bahwa komunikasi turut menyasar kelompok perempuan dan pemuda, mengingat kedua kelompok ini kerap memiliki akses informasi yang berbeda dari tokoh adat formal. Dengan demikian, strategi dialog Milobs TNI bercirikan pendekatan inklusif, bertahap, dan berbasis kepercayaan, yang secara konsisten melibatkan berbagai lapisan masyarakat guna memperkuat legitimasi peran Milobs sebagai fasilitator perdamaian yang netral.

Faktor Penghambat dalam Berdialog dengan Masyarakat Beberapa faktor menghambat efektivitas dialog Milobs TNI dengan masyarakat Abyei. Pertama, kendala bahasa menjadi hambatan mendasar karena tidak semua warga fasih berbahasa Inggris atau Arab, sementara penerjemah lokal yang digunakan tidak selalu mampu menyampaikan makna secara akurat (INF-01). Kedua, faktor kepercayaan turut menjadi tantangan signifikan; menurut INF-02, sebagian masyarakat masih menaruh kecurigaan terhadap pasukan asing dan khawatir informasi yang mereka sampaikan dapat disalahgunakan atau menimbulkan risiko bagi diri mereka sendiri. Ketiga, ketidakstabilan situasi keamanan turut membatasi ruang dialog; INF-03 menjelaskan bahwa eskalasi ketegangan sekecil apa pun kerap membuat masyarakat menutup diri dari komunikasi dengan Milobs. Keempat, norma budaya lokal turut membatasi siapa yang berhak berbicara mewakili komunitas, sehingga Milobs harus memahami struktur

sosial dan hierarki adat setempat sebelum menentukan mitra dialog yang tepat (INF-04). Kelima, faktor psikologis berupa kelelahan akibat konflik berkepanjangan membuat sebagian warga enggan membicarakan kembali pengalaman traumatis mereka (INF-05). Keenam, keterbatasan waktu penugasan turut menjadi kendala internal, karena jadwal patroli dan kewajiban pelaporan administratif yang padat mengurangi kesempatan Milobs untuk melakukan dialog secara mendalam (INF-06). Keenam faktor tersebut bersifat saling terkait dan menunjukkan bahwa keberhasilan dialog Milobs tidak semata bergantung pada kemampuan individu personel, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang kompleks dan dinamis di wilayah konflik.

Pembahasan

Temuan mengenai fungsi observasi dan pengawasan Milobs TNI sejalan dengan International Peacekeeping Operation sebagai grand theory penelitian ini, yang menegaskan bahwa penjagaan perdamaian merupakan operasi bersifat sukarela dan bergantung pada persetujuan serta kerja sama para pihak, tanpa mengandalkan kekuatan senjata untuk mencapai tujuan perdamaian (Jenkins, 2019). Praktik patroli, pos pengamatan tetap, dan pelaporan sistematis yang dijalankan Milobs TNI merepresentasikan fungsi memfasilitasi pelaksanaan perjanjian perdamaian dan mendukung proses perdamaian sebagaimana dikemukakan dalam definisi SIPRI mengenai misi penjaga perdamaian (Homan, 2015). Kehadiran fisik Milobs di titik-titik rawan gesekan turut menghasilkan efek pencegahan (deterrence effect) yang membuat pihak-pihak berpotensi bentrok berpikir dua kali sebelum bertindak, sebuah mekanisme yang konsisten dengan prinsip dasar pengamatan militer PBB (United Nations Department of Peacekeeping Operations, 1995).

Strategi dialog Milobs TNI turut mengonfirmasi middle theory penelitian ini, yaitu Teori Resolusi Konflik Komunal yang menekankan bahwa konflik antarkelompok seperti Dinka Ngok dan Misseriya tidak dapat diselesaikan semata melalui pendekatan koersif, melainkan memerlukan pendekatan sosial-budaya yang menghormati kearifan lokal dan trauma kolektif yang diwariskan lintas generasi (Jenkins, 2019). Pendekatan community-based dialogue yang dijalankan Milobs, termasuk pelibatan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda, sejalan dengan gagasan bahwa dialog yang difasilitasi operasi perdamaian PBB dapat memperkuat kapasitas penyelesaian konflik lokal (Ruggeri, Dorussen, & Gizelis, 2017; Cuhadar & Druckman, 2024). Selain itu, kesediaan Milobs memulai dialog dengan percakapan ringan sebelum menggali informasi yang lebih sensitif mencerminkan penerapan Teori Diplomasi Militer, yang menempatkan aktor militer sebagai penggerak komunikasi lintas struktur sosial guna membangun kepercayaan dan saling pengertian sebelum konflik mencapai titik kritis (Johansson, 2004). Pada level applied theory, temuan penelitian ini memperkuat konsep Manajemen Konflik yang memandang keberhasilan Milobs bukan diukur dari peniadaan konflik secara total, melainkan dari kemampuan mengelola situasi agar tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka melalui deteksi dini, fasilitasi ruang negosiasi netral, dan pemantauan berkelanjutan (Johansson, 2004). Praktik Milobs TNI yang secara konsisten memilah mitra dialog berdasarkan struktur sosial lokal turut sejalan dengan prinsip local ownership dalam pembangunan perdamaian internasional, yang menekankan pentingnya melibatkan aktor lokal agar intervensi eksternal memiliki legitimasi dan keberlanjutan (Ejdus, 2016; Von Billerbeck et al., 2024).

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperluas pemahaman yang dihasilkan Averil (2024) dan Taskiyah et al. (2021), yang lebih berfokus pada peran UNISFA secara kelembagaan dalam memfasilitasi dialog dan memantau demilitarisasi, dengan menghadirkan gambaran mikro mengenai bagaimana personel Milobs TNI secara individual

menerjemahkan mandat tersebut ke dalam praktik komunikasi lintas budaya sehari-hari. Temuan mengenai risiko dan tantangan yang dihadapi Milobs turut menguatkan hasil Mkeremy (2022) yang menyoroti tingginya risiko keamanan bagi pengamat militer PBB di Afrika, sekaligus memperkaya temuan Wol (2024) mengenai persistennya kesulitan UNISFA dalam menangani perselisihan batas wilayah dengan menunjukkan bahwa kendala tersebut turut berakar pada faktor bahasa, kepercayaan, dan norma budaya di level komunikasi antarpersonal, bukan semata pada level kebijakan dan kelembagaan. Sejalan dengan itu, kajian Hellmüller, Tan, dan Bara (2024) tentang keragaman mandat misi perdamaian PBB turut menegaskan bahwa efektivitas misi observer sangat bergantung pada bagaimana mandat umum diterjemahkan menjadi praktik operasional yang kontekstual di lapangan, sebagaimana ditunjukkan oleh strategi adaptif Milobs TNI di Abyei.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan relevansi pengintegrasian grand theory, middle theory, dan applied theory secara simultan untuk menjelaskan praktik peacekeeping pada level individu personel, sebuah pendekatan yang belum banyak dilakukan pada kajian-kajian terdahulu yang cenderung berhenti pada level kelembagaan atau kebijakan (Haripin, 2020; Caplan, Gledhill, & Meiske, 2024). Secara praktis, temuan mengenai enam faktor penghambat dialog—bahasa, kepercayaan, keamanan, budaya, psikologis, dan keterbatasan waktu—memberikan basis empirik bagi penyusunan modul pelatihan pra-penugasan yang lebih spesifik bagi personel Milobs TNI, khususnya terkait penguatan kemampuan bahasa lokal, sensitivitas budaya, dan manajemen waktu antara kewajiban administratif dan pembangunan relasi sosial dengan masyarakat wilayah konflik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Milobs TNI telah menjalankan fungsi observasi dan pengawasan situasi keamanan di Abyei, Sudan, secara disiplin melalui patroli rutin, dokumentasi sistematis, dan pelaporan berkala kepada UNISFA, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip netralitas sebagai syarat mutlak keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian. Strategi dialog yang diterapkan Milobs TNI kepada masyarakat Abyei terbukti menjadi instrumen penting dalam memperoleh data faktual mengenai kondisi sosial dan keamanan, melalui pendekatan bertahap yang dimulai dari percakapan ringan, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama, hingga penjangkauan kelompok perempuan dan pemuda, sehingga membangun kepercayaan lintas komunitas yang berkonflik. Meskipun demikian, efektivitas dialog tersebut masih dibatasi oleh enam faktor yang saling terkait, yaitu kendala bahasa, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pasukan asing, ketidakstabilan situasi keamanan, norma budaya yang mengatur siapa yang berhak mewakili komunitas, kelelahan psikologis akibat trauma konflik berkepanjangan, serta keterbatasan waktu di tengah beban tugas administratif Milobs. Secara keseluruhan, keberhasilan strategi penanganan konflik oleh Milobs TNI ditentukan oleh integrasi antara fungsi observasi, diplomasi militer, komunikasi lintas budaya, dan pelibatan tokoh lokal, yang sekaligus menegaskan relevansi kerangka International Peacekeeping Operation, Teori Resolusi Konflik Komunal, Teori Diplomasi Militer, dan konsep Manajemen Konflik dalam menjelaskan praktik peacekeeping pada level personel di lapangan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain cakupan informan yang terbatas pada personel Milobs TNI di Sektor Utara dan Sektor Tengah UNISFA sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika di seluruh sektor penugasan, serta rentang waktu kajian yang terbatas pada periode 2023–2024 sehingga belum menangkap dampak jangka panjang kehadiran Milobs terhadap stabilitas sosial Abyei. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan informan lintas sektor, mengkaji aspek psikologis masyarakat lokal secara lebih mendalam, serta menelaah peran civil affairs dan kerja sama sipil-militer dalam

mendukung efektivitas dialog pada misi-misi perdamaian PBB lainnya. Selain itu, penguatan pelatihan pra-penugasan yang mencakup bahasa lokal, sensitivitas budaya, dan manajemen waktu antara tugas administratif dan pembangunan relasi sosial perlu terus dikembangkan oleh PMPP TNI guna mengoptimalkan peran Milobs pada penugasan mendatang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dosen pembimbing, seluruh informan personel Milobs TNI dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achol, B. (2024). Violence rises across South Sudan's disputed Abyei state. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Brief.
- Averil, A. D. (2024). Peran PBB dalam menangani konflik Abyei antara Sudan dan Sudan Selatan. *Journal of Social Political Sciences*, 5(2), 112–126.
- Blattman, C., Hartman, A. C., & Blair, R. A. (2014). How to promote order and property rights under weak rule of law? An experiment in changing dispute resolution behavior through community education. *American Political Science Review*, 108(1), 100–120.
- Caplan, R., Gledhill, J., & Meiske, M. (2024). Exploring the impact of United Nations peacekeeping operations on the external affairs of host states. *European Journal of International Relations*, 30(3), 1–29.
- Carmona, L., Camilo, C., Carvalho, V. S., & Chambel, M. J. (2024). Post-traumatic stress disorder in peacekeepers: A systematic literature review and meta-analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 15(1), Article 2413735.
- Cuhadar, E., & Druckman, D. (2024). Let the people speak! What kind of civil society inclusion leads to durable peace? *International Studies Perspectives*, 25(3), 359–381.
- Curran, D. (2024). Learning to protect? Identifying elicitive approaches in protection of civilians training for UN peacekeepers. *Civil Wars*, 26(1), 160–186.
- Diamond, L., & McDonald, J. W. (1996). *Multi-track diplomacy: A systems approach to peace* (3rd ed.). Kumarian Press.
- Duursma, A. (2019). Obstruction and intimidation of peacekeepers: How armed actors undermine civilian protection efforts. *Journal of Peace Research*, 56(2), 234–248.
- Ejdus, F. (2016). Local ownership in international peacebuilding: Key theoretical and practical issues. *Global Affairs*, 2(3), 369–370.
- Haripin, M. (2020). *Civil-military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war*. Routledge.
- Hellmüller, S., Tan, X.-Y. R., & Bara, C. (2024). What is in a mandate? Introducing the UN Peace Mission Mandates dataset. *Journal of Conflict Resolution*, 68(1), 166–192.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary international humanitarian law: Volume I—Rules*. Cambridge University Press.
- Homan, K. (2015). *Peacekeeping operations in a changing world*. Clingendael Strategic Monitor Project.
- Jenkins, B. (2019). Basic concepts and theories in international peacekeeping: An analytic review. *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations*, 8(16), 51–80.
- Johansson, C. R. (2004). Military observers' reaction and performance when facing danger. *Military Psychology*, 16(4), 211–229.
- Mkeremy, M. N. (2022). Challenges of United Nations military observers in the contemporary peacekeeping operation environment in Africa. *International Diplomatic Review Journal*, 7(1), 45–61.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian*.

- Puspen TNI. (2019). Komandan PMPP TNI: Personel Milobs dan Milstaff bertugas sebagai duta bangsa Indonesia. Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Ruggeri, A., Dorussen, H., & Gizelis, T.-I. (2017). Winning the peace locally: UN peacekeeping and local conflict. *International Organization*, 71(1), 163–185.
- Soegeng, R., Pedrason, S., Sumarlan, S., & Hermawan, T. (2021). Arrangement of the position of division command for higher officers in the MONUSCO United Nations Mission in the framework of strengthening Indonesian defense diplomacy. *International Journal of Education and Social Science Research*, 4(4), 80–104.
- Taskiyah, T., Elvlyn, E., & Meigen, F. (2021). Peran PBB dalam mengatasi konflik antara Sudan dan Sudan Selatan di Abyei melalui United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA). *Jurnal Untar*, 4(2), 88–101.
- Tchie, A. E. Y., & Edu-Afful, F. (2024). A forgotten people in an unstable region: The effectiveness of the United Nations Interim Security Force for Abyei. *Norwegian Institute of International Affairs*.
- United Nations Department of Peacekeeping Operations. (1995). *United Nations military observers handbook*. United Nations.
- United Nations News. (2024a). Ongoing war in Sudan stalls progress in disputed Abyei region. *United Nations News Service*.
- United Nations News. (2024b). UN force steps up patrols after weekend of bloodshed in Abyei. *United Nations News Service*.
- United Nations Press. (2024). Security Council extends mandate of United Nations Interim Security Force for Abyei for one year, adopting resolution 2760. *United Nations Security Council Press Release*.
- United Nations Security Council. (2011). Resolution 1990 (2011): Establishment of the United Nations Interim Security Force for Abyei.
- United Nations Security Council. (2024). Resolution 2760 (2024).
- Von Billerbeck, S., Coleman, K. P., Eckhard, S., & Zyla, B. (2024). Local knowledges in international peacebuilding: Acquisition, filtering, and systematic bias. *International Studies Review*, 26(4), 1–24.
- Wol, D. M. D. (2024). United Nations peacekeeping operations and the challenge of communal violence in host communities: The case of the United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA). *European Journal of Applied Sciences*, 12(6), 331–343.